

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Kajian Pustaka

##### 2.1.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian, diantaranya :

Susanto A.B (2015), "*Impact Of Economic Growth, Inflation, And Minimum Wage On Proverty in Java*". Penelitian yang dilakukan peneliti mempunyai tujuan bagaimana pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di pulau Jawa. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan regresi data panel dinamis berdasarkan *Error Correction Model* (ECM). Hasil penelitian yang didapatkan adalah pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan dampak yang negatif, maka dapat disimpulkan apabila pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat kemiskinan di pulau Jawa akan turun, sementara untuk inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan dan yang terakhir adalah Upah minimum yang tidak mempunyai pengaruh terhadap sama sekali terhadap tingkat kemiskinan.

Sekar, Dita Ayu (2018), melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Tingkat Pengangguran Terbuka, IPM, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015". Tujuan dalam penelitian tersebut adalah menganalisis pengaruh Produk

Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2015. Jenis penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan alat analisis regresi data panel. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah Produk Domestik Regional bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur, Dan untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) berpengaruh positif jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur.

Hambarsari, Dwi Puspa (2016), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2004-2014”. Dalam penelitiannya mempunyai tujuan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam kurun waktu tahun 2004 hingga 2014 dan metode yang dipakai adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sementara itu pertumbuhan penduduk dan inflasi berpengaruh positif.

Permana dan Anggit (2012), telah melakukan penelitian yaitu “Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004 – 2009”. Penelitian yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di 35 kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 – 2009”. Data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik analisis data panel yang terdiri dari data *time series* pada tahun 2004 – 2009, dan data *cross section* dengan menggunakan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hasil yang didapatkan pada penelitian tersebut adalah PDRB, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan sementara pengangguran berpengaruh positif.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, Adit Agus (2010) Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdapat panel data dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) dan menggunakan jenis data sekunder. Hasil dari penelitian ini terdapat bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan. Persamaan penelitian ini yaitu menggunakan model *fixed effect model*. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel upah minimum dan tingkat pengangguran.

Rohani (2016) meneliti pengaruh pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi

Selatan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, dan variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan dapat dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas Chambers (dalam Suryawati, 2005 : 1) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *intergrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*poverty*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*dependence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri (Suryawati, 2005 : 1)

Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.
2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, berkaitan dengan kelangkaan sumber daya alam dan prasarana umum, serta keadaan tanah yang tandus.
2. Kemiskinan buatan, lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak mendapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.

Bappenas mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu atau tidak dapat memenuhi hak-hak dasar mereka untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak-hak dasar masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Kemiskinan dapat kita pahami dalam berbagai cara, pemahaman utamanya seperti:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi dimana mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda bagaimana cara mereka sendiri untuk mencukupinya.

### **2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan**

#### **2.3.1 Upah**

Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dengan wajar. Ini merupakan imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan

pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan memberikan kepada pekerja dalam bentuk upah. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Jadi dengan begitu upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang kepada pengusaha. Upah dibayar oleh pengusaha sesuai atau sama dengan usaha kerja (produktivitas) yang diberikan kepada pengusaha (Sonny Sumarsono, 2003). Upah merupakan salah satu unsur untuk menentukan harga pokok dalam perusahaan, karena ketidaktepatan dalam menentukan besarnya upah akan sangat merugikan perusahaan. Oleh karenanya ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah yaitu sebagai berikut :

1. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja, untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tinggi dan jumlah tenaga kerjanya langka, maka upah cenderung tinggi, sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang banyak biasanya upahnya juga cenderung turun.
2. Organisasi Buruh, jika terdapat organisasi buruh maka akan mempengaruhi tingkat upah. Dengan adanya serikat buruh yang kuat akan dapat meningkatkan tingkat upah demikian pula sebaliknya.
3. Kemampuan untuk Membayar Pemberian upah tergantung pada kemampuan membayar dari perusahaan. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu

komponen biaya produksi, tingginya upah akan mengakibatkan tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya akan mengurangi keuntungan.

4. Produktivitas Kerja, upah sebenarnya adalah imbalan atas prestasi kerja karyawan. Semakin tinggi prestasi kerja karyawan, maka semakin besar upah yang mereka terima. Prestasi kerja ini dinyatakan sebagai produktivitas kerja.

### **2.3.2 Teori Upah Minimum**

Dalam pasar tenaga kerja sangat penting untuk menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya. Untuk itu dalam Undang-undang upah minimum menetapkan harga terendah tenaga kerja yang harus dibayarkan (Mankiw, 2006). Menurut Kaufman (2000), tujuan utama ditetapkannya upah minimum itu sendiri adalah untuk memenuhi standar hidup pokok mereka seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan mereka. Upah minimum ini bertujuan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin.

Kebijakan upah minimum di Indonesia tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk



mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing-masing provinsi. Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi upah minimum regional dan upah minimum sektoral.

1. Upah Minimum Regional

Upah Minimum Regional yaitu upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu.

2. Upah Minimum Sektoral

Upah minimum sektoral yaitu upah yang berlaku didalam suatu provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : Per-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah minimum sektoral dibedakan menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II).

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEP-226/MEN/2000) tentang perubahan pada pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20 dan 21 PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka

terjadi perubahan istilah Upah Minimum Sektorial Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektorial Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektorial Kabupaten /Kota (UMSkab/kota). Variabel-variabel yang mempengaruhi upah minimum regional (UMR) Tingkat I dan II sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, adalah sebagai berikut : kebutuhan hidup minimum (KHM), indeks harga konsumen (IHK), kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, tingkat upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan perkapita.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 88 (4) tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa besaran upah minimum antara lain didasarkan pada tahap pencapaian KHL, pertumbuhan PDRB, produktivitas, dan mempertimbangkan keberadaan sektor marjinal (usaha yang paling tidak mampu). Pada pelaksanaannya, pertimbangan pada usaha tidak mampu ternyata belum dapat dioperasionalkan.

### **2.3.3 Pertumbuhan ekonomi**

Suatu pertumbuhan dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila jumlah barang dan jasa meningkat. Jumlah barang dan jasa tersebut dalam perekonomian dapat diartikan sebagai nilai dari Produk Domestik Bruto (PDB). Nilai

PDB dapat digunakan untuk mengukur perekonomian suatu Negara. Perubahan nilai PDB biasanya akan menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode tertentu. Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, pertama faktor ekonomi (sumber daya alam, akumulasi modal, organisasi, kemajuan teknologi) dan faktor nonekonomi (faktor social, factor manusia, faktor politik dan administratif). Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumberdaya manusia, modal, usaha, teknologi, dan sebagainya (Jhingan M.L, 1990).

Schumpeter menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus tetapi mengalami keadaan dimana adakalanya berkembang dan pada seketika lain mengalami kemunduran. Konjungtor tersebut disebabkan oleh kegiatan para pengusaha (entrepreneur) melakukan inovasi dan pembaharuan dalam kegiatan mereka menghasilkan barang dan jasa. Untuk mewujudkan inovasi yang seperti ini investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi akan dilakukan, dan penambahan investasi akan meningkat kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 2000).

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya (Cremin & Nakabugo 2012). Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank).

Menurut Kuznets (dikutip dari Budiono, 1999: 41) Pertumbuhan Ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada. Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. Persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. Pola persebaran penduduk.

Boediono (1999:46) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:

1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output perkapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan

ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Todaro (dikutip dari Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.
2. Faktor Sumber Daya Alam Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya.

Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.
4. Faktor Budaya Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN, dan sebagainya.
5. Sumber Daya Modal Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickledown dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

#### **2.3.4 Inflasi**

Definisi Inflasi kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus menerus. Kenaikan harga suatu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi kecuali kenaikan harga tersebut meluas kemana-mana. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kenaikan satu atau beberapa barang pada saat tertentu dan hanya sementara belum tentu menimbulkan inflasi. Menurut Murni (2006) mendefinisikan inflasi sebagai suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus menerus. Berdasarkan definisi ini ada tiga kriteria yang perlu diamati untuk melihat telah terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga, bersifat umum dan terus menerus.

Inflasi merupakan bagian dari keadaan prekonomian yang akan dialami oleh suatu negara, hanya saja setiap negara memiliki tingkat inflasi yang berbeda-beda. Untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan Indeks Harga Konsumen. Selain itu dalam beberapa istilah penggunaan inflasi digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang, yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya

harga. Beberapa ekonom (dari beberapa sekolah di Austria) masih menggunakan arti ini dan peningkatan harga-harga. Inflasi yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda. Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor faktor ekspor impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta.

Inflasi sebagai suatu kenaikan harga yang terus menerus dari barang dan jasa secara umum ( bukan satu macam barang saja dan sesaat ). Menurut definisi ini, kenaikan harga yang sporadis bukan dikatakan sebagai Inflasi. Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dijumpai di hampir semua Negara di dunia. Inflasi adalah kecenderungan dari harga – harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang – barang lain (Boediono, 1995).

### **2.3.5 Pengangguran**

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 1999).

Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

#### **1. Pengangguran Alamiah**

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran



sebanyak lima persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah.

## 2. Pengangguran Friksional

Suatu jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

## 3. Pengangguran Struktural

Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. Tiga sumber utama yang menjadi penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah:

- 1) Perkembangan teknologi.
- 2) Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain.
- 3) Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat dikawasan lain.

## 4. Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

## 2.4 Hubungan Antara Variabel

### 2.4.1 Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

tujuan utama ditetapkannya upah minimum itu sendiri adalah untuk memenuhi standar hidup pokok mereka seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan mereka. Upah minimum ini bertujuan mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikkan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum.

#### **2.4.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan**

Pertumbuhan ekonomi sendiri dapat menjadi kekuatan pendorong untuk menghasilkan kekayaan yang nantinya akan menetes kebawah untuk memberantas kemiskinan dan semua masalah yang menyertainya (Cremin & Nakabugo 2012). Pendidikan merupakan investasi yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Mendidik anak-anak miskin memiliki peluang yang tinggi untuk membawa mereka keluar dari kemiskinan (World Bank). Hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dan kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran, yakni efek trickledown dari pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan dari kelompok miskin. Dengan asumsi bahwa ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi trickle-down dari keuntungan dari pertumbuhan ekonomi kepada

kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

#### **2.4.3 Hubungan Inflasi dengan Kemiskinan**

Inflasi merupakan indikator yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Inflasi akan menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Salah satu akibat penting dari inflasi adalah cenderung menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dapat diwujudkan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, maka akan menimbulkan efek yang buruk juga kepada kesejahteraan masyarakat dan prospek ekonomi dalam jangka panjang.

#### **2.4.4 Hubungan Tingkat Pengangguran dengan Kemiskinan**

Menurut Sadono Sukirno (2004), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlakudandanmenimbulkanefekyangburukbagikepadakesejahteraanmasyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

### **2.5 Hipotesis**

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga UMR berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Diduga inflasi negatif berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Diduga tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (Y) adalah Kemiskinan di Indonesia, variabel independen ( $X_1$ ) adalah Upah Minimum Regional (UMR) , variabel independen ( $X_2$ ) adalah Pertumbuhan Ekonomi, variabel independen ( $X_3$ ) adalah Laju Inflasi, variabel independen ( $X_4$ ) adalah tingkat pengangguran.